



BPK Minta Pemkot Surabaya Evaluasi Pendapatan Daerah

Temukan Hotel dan Restoran yang Kurang Bayar Pajak

SURABAYA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jatim memberikan sejumlah catatan kepada Pemkot Surabaya Rabu (31/1) siang. Di antaranya temuan restoran dan hotel yang kurang dalam membayar pajak.

Kepala Perwakilan BPK Jatim Karyadi mengatakan, ada beberapa catatan atas pemeriksaan keuangan soal pendapatan asli daerah (PAD). Seperti, terbukti masih banyak restoran, hotel, dan berbagai objek pajak yang masih kurang dalam membayar pajak. Sektor pajak dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan pendapatan asli daerah dari retribusi juga perlu pembenahan kebijakan. "Aturan sudah



WAHYU ZANUAR BUSTOMI/JAWA POS

PAPARAN: Pertemuan perwakilan BPK Jatim dan Pemkot Surabaya di ruang sidang balai kota kemarin (31/1) membahas keuangan daerah.

ada. Namun, mungkin kurang memadai sehingga harus ada evaluasi," terang Karyadi di ruang sidang Balai Kota kemarin (31/1).

BPK menguji semua sistem PAD Pemkot Surabaya ini agar sistem pengendalian internal tersebut berjalan dengan baik. Sehingga tidak ada oknum yang bermain. "Kalau kategori dari dulu Surabaya WTP (wajar tanpa pengecualian, Red) terus. Cuma, masalah temuan masih ada," tegasnya.

Saat ini pemeriksaan oleh BPK sedang berlangsung dan masih tahap pendahuluan. Pada 5 Maret, semua

hasil laporan keuangan pemkot diserahkan ke BPK. "Pemeriksaan selama 60 hari baru terlihat ada catatan atau tidaknya," terangnya.

Dari sudut sistem keuangan internal kecil kemungkinan ada catatan. Kalaupun ditemukan, biasanya permasalahan kecil. Misalnya, pengadaan barang tapi belum tercatat. Padahal, barang dan kontraknya ada. Biasanya ini karena petugas lupa, karena akuntansi yang dibuat harus standar pemerintah.

Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan, pengarahannya dari BPK Perwakilan Jatim itu tindak

lanjut dari yang sudah dilakukan pemkot sebelumnya. Pada 2021 evaluasi dari BPK yang sudah ditindaklanjuti 63 persen dari catatan yang diberikan. Kemudian 2022 meningkat 93 persen. "Semester pertama tahun 2023 tindak lanjut sudah 95 persen," sebutnya.

Menurutnya, pada semester kedua tahun 2023, capaian tindak lanjut sudah 97 persen. Ada beberapa evaluasi dari BPK yang menjadi PR pemkot. Misalnya, banyak pembayaran PBB yang orangnya sudah tidak ada. Termasuk tagihan pajak ke alamat yang sudah

tidak ada. Hal itu yang harus diselesaikan pemkot tahun ini. Sehingga evaluasi dari BPK bisa 100 persen.

Menurut Eri, pengarahannya dari BPK justru bisa mengembangkan PAD pemkot. Karena ada sesuatu yang baru yang bisa dikembangkan pemkot. Misalnya soal tarif videotron dan reklame. Perbedaan lokasi seharusnya menentukan perbedaan harga. Masukan tersebut akan digunakan pemkot dalam mengambil kebijakan. "Pemeriksaan dari BPK juga wujud pemkot bertanggungjawabkan APBD," terangnya. (omy/c17/jun)